

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA BARAT
2013 - 2018**



DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA BARAT

2013 - 2018



REVISI RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami telah dapat menyelesaikan Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat untuk periode jangka menengah, yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk Rencana Strategis. Rencana Strategis disusun berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada suatu rencana strategis yang telah ditetapkan oleh masing – masing Instansi.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) dilakukan pada tahun 2015, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dengan tujuan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Akhirnya, semoga Revisi Rencana Strategis ini dapat dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun perencanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Barat untuk kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018

Bandung, April 2016
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Dr. H. DUDI SUDRADJAT ABDURACHIM, MT.

Pembina Utama Madya
NIP. 19610924 198603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT	9
2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI	9
2.1.1. <i>Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat</i> :	9
2.1.2. <i>Struktur Organisasi</i>	10
2.2. SUMBER DAYA DINAS KOPERASI DAN UMKM	14
2.2.1. <i>Personil</i>	13
2.2.2. <i>Aset/Modal</i>	16
2.3. KINERJA PELAYANAN OPD	16
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	37
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN OPD	37
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH	40
3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA OPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	42
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	43
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	46
4.1. VISI DAN MISI JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT	46
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT	48
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT	49
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	52

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	59
BAB VII PENUTUP	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Personil Berdasarkan Golongan/Pangkat/Jabatan	14
Tabel 2. Jumlah Personil Berdasarkan Latar Pendidikan Akhir	15
Tabel 3. Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Jabatan	15
Tabel 4. Aset/Modal Dinas Koperasi dan UMKM	16
Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	22
Tabel 6. Peranan UKM Terhadap PDRB menurut Skala Usaha (Tanpa Migas) Tahun 2010 – 2012 (persen).....	26
Tabel 7. Identifikasi Lingkungan <i>Strategic</i>	27
Tabel 8. Komparasi Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran RENSTRA Kementerian KUMKM	32
Tabel 9. Telaah Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat	34
Tabel 10. Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	35
Tabel 11. Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
Tabel 12. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.....	38
Tabel 13. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah	42
Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKK Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 15. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	44
Tabel 16. Nilai Skala Kriteria	45
Tabel 17. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	46

Tabel 19. Tujuan, Sasaran, Serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	49
Tabel 20. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat ...	50
Tabel 21. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.....	54
Tabel 22. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang terpusat dan tidak merata serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik yang demokratis dan berkeadilan telah menghasilkan fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh. Rapuhnya fondasi perekonomian nasional telah mengakibatkan Indonesia terjebak dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan serta menurunnya daya saing ekonomi nasional.

Konstitusi Republik Indonesia menegaskan salah satu tujuan pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, yang berarti kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan maupun golongan. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan representasi rakyat Indonesia dalam kehidupan ekonomi nasional, sehingga perlu diberikan prioritas yang tinggi dalam pembangunan nasional. Untuk itu, perlu disusun rencana pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia yang terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap ekonomi berbasis kerakyatan. Berbagai arah perkembangan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia tersebut sejalan dengan berbagai komitmen dan kesepakatan di tingkat Internasional seperti tujuan pembangunan milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs), *ASEAN Economic Community* (AEC), *Asia Free Trade Area* (AFTA).

Perkembangan ekonomi berbasis kerakyatan merupakan salah satu sektor yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas dan untuk memenuhi hak warga negara Indonesia yang dijamin melalui ketentuan peraturan dan perundang-undangan serta komitmen negara terhadap kesepakatan internasional. Kebijakan Pemerintah Indonesia mengarah pada peningkatan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, sangat penting, langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih terpadu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata maupun sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri.

Jawa Barat merupakan daerah potensial dalam perekonomian Nasional, tercatat Provinsi Jawa Barat merupakan penyumbang terbesar ketiga terhadap PDB Nasional selama kurun waktu tahun 2008 - 2010 setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kontribusi PDB Provinsi Jawa Barat terhadap PDB Nasional yaitu, tahun 2008 kontribusi PDB Jawa Barat sebesar 14,56%, tahun 2009 kontribusi PDB Jawa Barat sebesar 14,49% dan tahun 2010 kontribusi PDB Jawa Barat sebesar 14,49%. Hal ini memperlihatkan Provinsi Jawa Barat memiliki beberapa keunggulan antara lain, sebagai pusat kegiatan ekonomi, memiliki infrastruktur lebih baik, memiliki tenaga kerja terampil dan mudahnya akses pasar dalam negeri dan internasional bagi produk yang dihasilkan.

Kinerja ekonomi Jawa Barat sepanjang Tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian Jawa Barat tahun 2012, yang dihitung tanpa migas, mengalami pertumbuhan sebesar 6,53 persen melambat dari pertumbuhan pada tahun sebelumnya sebesar 6,79 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada dua tahun terakhir lebih dominan didorong oleh pertumbuhan UMKM, dimana kontribusinya di tahun 2012 sebesar 4,12 persen dari LPE sebesar 6,79 persen dan 3,62 persen dari LPE sebesar 6,53 persen ditahun 2012. Dominasi sumbangan pertumbuhan dari sektor UMKM

selama tiga tahun terakhir berpengaruh terhadap peningkatan peranan UMKM pada periode tersebut, yakni dari semula 53,68 persen ditahun 2010 menjadi 54,20 persen ditahun 2011, kemudian 54,55 persen ditahun 2012.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan Koperasi dan UMKM seperti yang telah dituangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Salah satu misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat tahun 2013-2018 **“Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan melalui penguatan ekonomi pedesaan dan regional”**, misi tersebut dituangkan kedalam kebijakan KUMKM, berupa penguatan kelembagaan dan usaha KUMKM, peningkatan kapasitas SDM, akses pasar, akses pembiayaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan teknologi informasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan yang disusun dalam dokumen perencanaan.

Penyusunan rencana strategis merupakan kerangka teknis dari sebuah kerangka besar pemberdayaan dan pengembangan yang secara langsung menyentuh Koperasi dan UMKM di Jawa Barat. Rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Barat dalam periode tahun 2013-2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis tersebut merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Barat, yang di dalamnya memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif dari tahun 2013-2018, yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 dan RENSTRA Kementerian KUKM RI.

Dari uraian di atas perlu adanya suatu urutan prioritas program dan kegiatan tahunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM jangka menengah yang dipetakan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

Adapun dalam perkembangannya, review terhadap renstra dapat dilakukan apabila dipandang perlu. Oleh karena itu, maka pada tahun 2015 dilakukan review terhadap indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Revisi dilakukan mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Indikator Kinerja sehingga tersusunlah Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kemitraan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro/LKM;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara No 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 6 Tahun 2009, Lembaran Daerah No. 6 Tahun 2009 Seri E tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bergulir bagi Usaha Mikro dan Kecil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 70 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan kerangka Rencana Kebijakan, Program dan Kegiatan indikatif tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, adalah;

1. Sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;

2. Sebagai arah tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas;
3. Untuk menjamin komitmen bersama pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat serta pejabat pembuat dan pelaksana kebijakan lainnya terhadap program dan kegiatan yang telah disepakati dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Jawa Barat;
4. Sebagai landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2013 hingga 2018;
5. Sebagai alat ukur kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Mengemukakan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi; Sumber daya; Kinerja Pelayanan; dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengemukakan identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV.	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Mengemukakan Visi dan Misi Jangka Menengah; Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah; Strategi dan Kebijakan
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI.	INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII.	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT

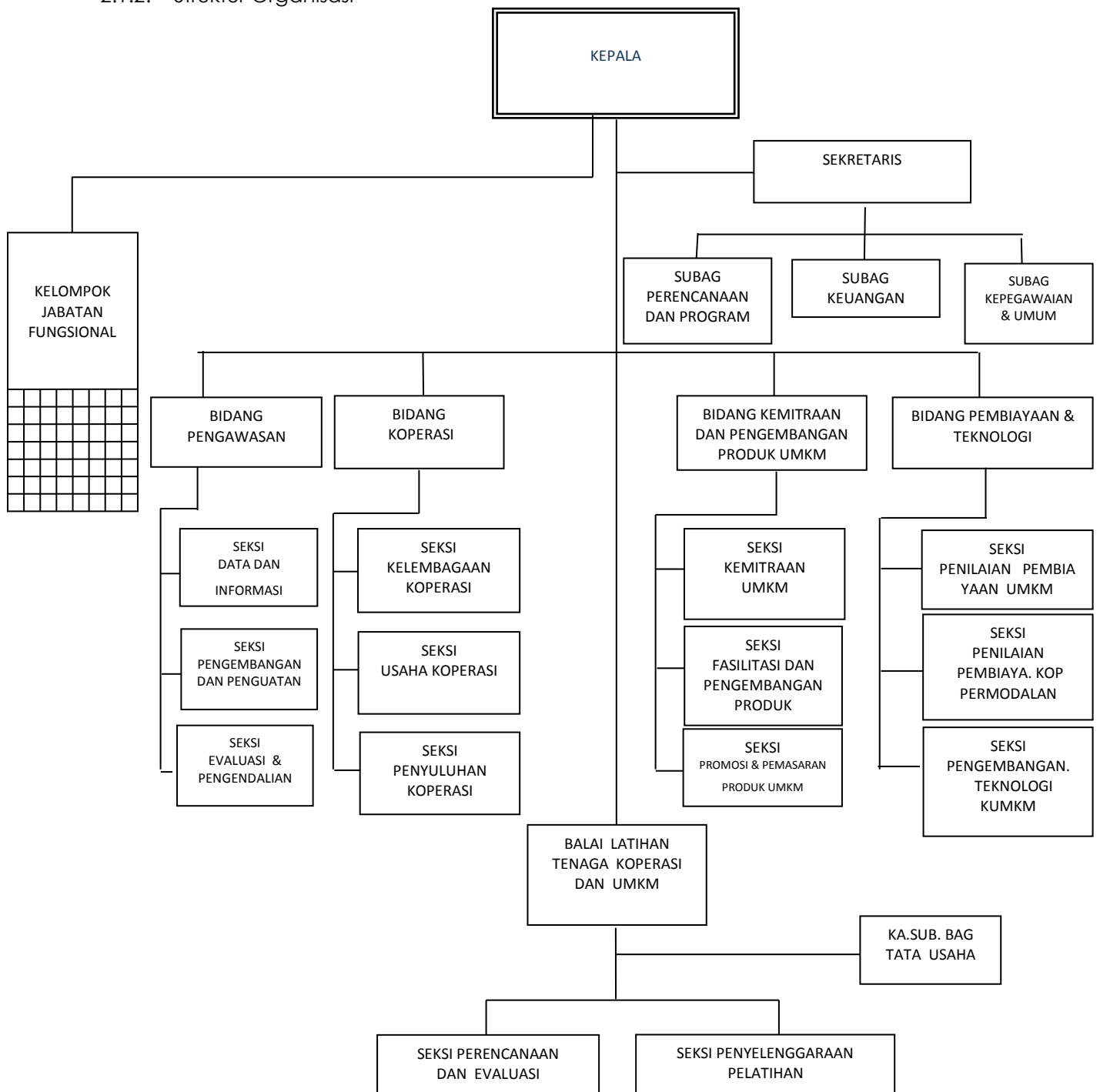
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja antara lain, sebagaimana tercantum dalam bagian satu pasal dua sebagai berikut:

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat :

1. Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
2. Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi koperasi, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, pengawasan serta pelatihan;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pelaksanaan tugas-tugas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah meliputi koperasi, kemitraan dan pengembangan produk UMKM, pembiayaan dan teknologi, serta pengawasan;
 - d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;
 - e. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 - f. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi



Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program Sekretariat;
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

2.1.2.2. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi koperasi meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penyuluhan koperasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koperasi yang meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penyuluhan koperasi;
2. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan penyuluhan koperasi;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan penyuluhan koperasi.

2.1.2.3. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan kemitraan dan pengembangan produk UMKM meliputi kemitraan UMKM, pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kemitraan dan pengembangan produk UMKM yang meliputi kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM;
2. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM.

2.1.2.4. Bidang Pembiayaan dan Teknologi

Bidang Pembiayaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan meliputi penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM.

Bidang Pembiayaan dan Teknologi mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembiayaan dan teknologi, yang meliputi penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM;
2. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM.

2.1.2.5. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengawasan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan pemberdayaan KUMKM, yang meliputi:

1. Pengelolaan data dan informasi, pengembangan, dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian;
2. Penyelenggaraan teknis operasional pengawasan pemberdayaan KUMKM meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemberdayaan KUMKM meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian.

2.1.2.6. Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan tenaga koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Balai Pelatihan tenaga Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM; dan
2. Penyelenggaraann dan Koordinasi pelatihan tenaga KUMKM

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Data Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMKM per bulan Desember tahun 2014, dalam melaksanakan tupoksi didukung oleh SDM sebanyak 99 orang terdiri dari:

2.2.1. Personil

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat memiliki 96 personil yang terbagi berdasarkan golongan dan kepangkatan sebagaimana terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Personil Berdasarkan Golongan/Pangkat/Jabatan

No	Golongan/Pangkat/Jabatan	Jumlah
1.	Golongan IV d	0
2.	Golongan IV c	2
3.	Golongan IV b	8
4.	Golongan IV a	9
5.	Golongan III d	24
6.	Golongan III c	13
7.	Golongan III b	18
8.	Golongan III a	3
9.	Golongan II d	1
10.	Golongan II c	1
11.	Golongan II b	13
12.	Golongan II a	4
13.	Golongan I d	0
14.	Golongan I c	0
15.	Golongan I b	0
16.	Golongan I a	0
	Jumlah	96

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM , 2014.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, maka komposisi personil yang merupakan kekuatan SDM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dari berbagai latar pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Personil Berdasarkan Latar Pendidikan Akhir

No	Latar Pendidikan Akhir	Jumlah
1.	Doktor/S3	2
2.	Strata 2/Magister	18
3.	Strata 1	45
4.	D IV	0
5.	D III	1
6.	D II	0
7.	D I	0
8.	SMU / Sederajat	26
9.	SMP	2
10.	SD	2
	Jumlah	99

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM , 2014.

Komposisi personil berdasarkan struktur jabatan yang ada pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	6
3.	Eselon IV	18
4.	Widyaiswara	7
5.	Fungsional Angka Kredit	2
6.	Fungsional Umum	62
	Jumlah	96

Sumber : Data Dinas Koperasi dan UMKM , 2014.

Berdasarkan Tabel 3 diatas, jumlah pejabat fungsional angka kredit baru dijabat oleh 2 orang, begitu pula fungsional widyaiswara baru 7 orang, sedangkan kebutuhan organisasi akan fungsional angka kredit masih banyak yang belum terisi, seperti fungsional perencana, pustakawan, arsiparis masing-masing baru 1 orang. Begitupula kebutuhan widyaiswara idealnya sesuai kebutuhan di UPTD Balatkop dan UMKM hingga 10 orang. Dengan demikian perlu ada pemetaan lebih lanjut melalui analisis kebutuhan jabatan fungsional di Dinas Koperasi dan UMKM.

2.2.2. Aset/Modal

Tabel 4. Aset/Modal Dinas Koperasi dan UMKM

No	Uraian	Jumlah		Keterangan			
		Vol	Sat	Kondisi			
				R	RB	H	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tanah	4	Unit				√
2	Peralatan dan Mesin Alat-alat angkutan Alat kantor & rumah tangga Peralatan dan mesin lainnya	98 7.022 59	Unit Unit Unit				√
3	Bangunan Gedung	11	Unit				√
4	Jalan	2	Bidang				√
5	Aktiva Tetap Lainnya Buku Perpustakaan	1.584	Unit				√
(Lampiran)							

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, 2013.

Keterangan : R (Rusak); RB (Rusak Berat); H (Hapus); B(Baik)

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Sasaran strategik yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2008-2013, mengacu kepada indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 khususnya bidang Koperasi dan UMKM, yaitu:

1. Terpenuhinya penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing melalui pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis, dengan indikator kinerja:
 - a. Terwujudnya jumlah wirausaha baru (per tahun sebanyak 3.000 Wirausaha; atau sebanyak 15.000 wirausaha selama periode 2008-2013);
 - b. Terwujudnya jumlah wirausaha yang berdaya saing (per tahun sebanyak 250 Wirausaha; atau sebanyak 1.250 wirausaha selama periode 2008-2013);
 - c. Jumlah peningkatan kapasitas SDM KUMKM (per tahun sebanyak 4.600 KUMKM; atau sebanyak 23.000 selama periode 2008-2013)
2. Tersedianya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan indikator kinerja:

- a. Jumlah lembaga Koperasi yang berkualitas, mencakup aspek standarisasi, akreditasi, sertifikasi kelembagaan koperasi (per tahun sebanyak 1.100 Koperasi; atau sebanyak 5.500 Koperasi selama periode 2008-2013);
 - b. Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM (per Tahun 400 KUMKM; atau sebanyak 2.000 KUMKM selama periode 2008-2013);
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana bagi KUMKM per tahun 50 KUMKM; atau sebanyak 250 KUMKM selama periode 2008-2013);
3. Terpenuhinya Pengembangan Akses Pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha, dengan indikator kinerja. Promosi Produk KUMKM per tahun melalui Jaringan dan Pameran (per tahun 50 KUMKM melalui jaringan dan 484 KUMKM melalui pameran; atau sebanyak 250 KUMKM melalui jaringan dan 2.420 KUMKM melalui pameran);
4. Terpenuhinya peningkatan akses permodalan bagi KUMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan mikro, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah akses permodalan ke lembaga keuangan mikro (per tahun sebanyak 200 KUMKM; atau sebanyak 1.000 KUMKM selama periode 2008-2013);
 - b. Jumlah akses terhadap teknologi tepat guna (per tahun sebanyak 1.040 KUMKM; atau sebanyak 5.200 KUMKM selama periode 2008-2013).
5. Meningkatnya kualitas aparatur daerah, dengan indikator kinerja :
 - a. Tingkat keterampilan aparatur (per tahun 100%);
 - b. Tingkat profesionalisme aparatur (per tahun 100%);
 - c. Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian internal dan eksternal (per tahun 100%);
6. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya (per tahun 100%);
 - b. Tingkat pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat (per tahun 100%);

7. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan indikator kinerja tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah (per tahun 100%);
8. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD (per tahun 100%);
 - b. Tingkat kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat (per tahun 100%);
9. Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja serta dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD/Balai/UPT/UPTD (per tahun 100%);
 - b. Tingkat ketersediaan dokumen operasional (per tahun 100%);
10. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat, dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah (per tahun 100%);

Sebagai upaya pencapaian target sasaran stratejik yang tercantum dalam Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2008-2013 tersebut diatas, sejak tahun 2009 s.d 2013 telah dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) Program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

Kesembilan program tersebut selama kurun waktu 2008-2013 telah dijabarkan kedalam berbagai jenis kegiatan, dimana indikator keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan tersebut tidak persis selalu sama untuk setiap tahunnya, namun demikian tetap mengacu kepada target hasil (*outcome*) sasaran stratejik tahunan yang tercantum dalam Renstra 2008-2013.

Hasil evaluasi pelaksanaan target capaian kinerja Renstra 2008-2013 adalah sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 5 di bawah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Realisasi capaian target kinerja Renstra dari tahun 2009 s.d 2012 rata-rata mencapai 66,1%; sedangkan dengan perkiraan capaian target kinerja Renja sampai dengan akhir tahun 2013 sebagaimana data analisis pada tabel tersebut maka perkiraan capaian target kinerja Renstra 2008-2013 hingga tahun 2013 diharapkan mencapai 88,25%
2. Berdasarkan data perkembangan realisasi capaian kinerja Renstra sejak tahun 2009 s.d 2012, serta kondisi ketersediaan anggaran pada tahun 2013, maka terdapat beberapa indikator kinerja yang mengalami ketidakoptimalan dalam upaya pencapaiannya. Oleh karena itu diharapkan melalui usulan program/kegiatan tahun 2014 dapat mengakselerasi upaya pencapaian target kinerja yang belum optimal tersebut;
3. Beberapa target kinerja Renstra 2008-2013 yang diperkirakan dapat dicapai secara optimal pada akhir tahun 2013, adalah:
 - a. Penciptaan Wirausaha Baru;
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM (terstandarisasi, terakreditasi, dan tersertifikasi);
 - c. Ketersediaan aspek legalitas bagi KUMKM (Ligalitas Halal, PIRT, dan Merk);
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana KUMKM (yang lebih diorientasikan pada penyediaan sarana pendampingan);
 - e. Peningkatan akses permodalan KUMKM ke lembaga keuangan mikro;

- f. Pelaksanaan promosi produk KUMKM melalui jaringan dan pameran KUMKM;
- g. Serta indikator kinerja penunjang, mencakup:
 - 1) Peningkatan kualitas aparatur daerah, pelayanan administrasi kepegawaian, serta penataan regulasi manajemen sumberdaya aparatur daerah
 - 2) Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya, terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat, serta terlaksananya pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan publik provinsi.
 - 3) Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, serta terlaksananya upaya pemberian penghargaan kepada masyarakat dan lembaga yang berkontribusi kepada pembangunan Jawa Barat.
 - 4) Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD, serta terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.
 - 5) Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja pada unit kerja OPD, serta tersedianya dokumen operasional OPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.
 - 6) Tersedianya data/informasi a-spasial dan spasial yang mutakhir dan akurat menuju satu data pembangunan Jawa Barat.

Beberapa target kinerja Renstra 2008-2013 yang tidak akan dapat dicapai secara optimal sampai akhir tahun 2013, adalah:

- 1. Aspek perwujudan wirausaha yang berdaya saing;
- 2. Aspek peningkatan kapasitas SDM KUMKM;
- 3. Aspek peningkatan akses KUMKM terhadap TTG;

Beberapa faktor yang menyebabkan kemungkinan ketidaktercapaian secara optimal target-target kinerja tersebut antara lain adalah:

1. Target kinerja yang cukup tinggi dibandingkan dengan ketersediaan sarana-prasarana, sumber daya dan peluang anggaran pada tahun depan;
2. Substansi indikator kinerja tersebut merupakan bagian dari ranah tupoksi kelembagaan/OPD lain, serta sudah merupakan bagian dari peran aktivitas dunia usaha.

Adapun rekapitulasi evaluasi pencapaian Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sampai dengan Tahun 2013, menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) indikator kinerja program/kegiatan terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mencapai 100%, sedangkan program kegiatan yang dilaksanakan sebagai kegiatan rutin, pada umumnya mencapai 100%.

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di Kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh OPD	Jumlah program Nasional yang dilaksanakan oleh OPD		96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%	96.68%
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq. Kementrian/ LPNK	Keberadaan standar operating Procedure (SOP)		Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP		Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP				Ada, 1 (satu) SOP	Ada, 1 (satu) SOP			
II	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Perda yang harus dilaksanakan OPD menurut peraturan Menteri (PERMEN)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN		93.33%	93.33%	93.33%	93.33%		93.33%	93.33%				93.33%	93.33%			
III	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur Jabatan	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi		100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%			
			Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD		Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)		Ada 3 jbtn (9 Org)	Ada 3 jbtn (9 Org)				Ada 3 jbtn (8 Org)	Ada 3 jbtn (10Org)			
IV	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait	Rasio PNS Provinsi		0,82%	0,82%	0,82%	0,82%		0,82%	0,82%				0,82%	0,82%			
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan		100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan		100%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	100%			
V	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD - Renstra OPD - Renja OPD - RKA OPD		3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok	3 Jenis Dok		3 Jenis Dok	3 Jenis Dok				3 Jenis Dok	3 Jenis Dok			
		Sinkronisasi Program Renja OPD dengan Program RKPD	Jumlah Program RKPD yang Diakomodir dalam Renja OPD		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %				100 %	100 %	8 program		
		Sinkronisasi program RKA OPD dengan Program RENJA OPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang Diakomodir dalam RKA OPD		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %				100 %	100 %	8 program		
		Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran	Jumlah program RENJA OPD Diakomodir dalam DPA OPD		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %				100 %	100 %	8 program		
VI	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	Anggaran OPD terhadap total belanja APBD		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%		0,30%	0,30%				0,30%	0,30%			
		Besaran belanja Modal	Belanja modal terhadap total belanja OPD		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%		5,56%	5,56%				5,56%	5,56%			
		Besaran belanja pemeliharaan	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa		7,99%	7,99%	7,99%	7,99%		7,99%	7,99%				7,99%	7,99%			
			Total belanja pemeliharaan dari total belanja OPD		3,93%	3,93%	3,93%	3,93%		3,93%	3,93%				3,93%	3,93%			
		Laporan Keuangan OPD	Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, Calk)		Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis		Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis				Ada, sebanyak 3 jenis	Ada, sebanyak 3 jenis			

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
VII	PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset OPD	Keberadaan inventarisasi barang atau asset OPD		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada				Ada	Ada			
		Penggunaan Asset OPD	Jumlah yang tidak digunakan oleh OPD		21,94 %	21,94 %	21,94 %	21,94 %		21,94 %	21,94 %				21,94 %	21,94 %			
VIII	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil Keliling 5. Pengumuman di mess Media		Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis		Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis				Jumlah sebanyak 6 Jenis	Jumlah sebanyak 6 Jenis			
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	Keberadaan survey kepuasan masyarakat		Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada				Ada	Ada			
IX	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	Koperasi Aktif	Proporsi koperasi aktif terhadap jumlah koperasi di seluruh kab/kota		61,75 %	61,75 %	61,75 %	61,75 %		61,75 %	61,75 %				75 %	90 %	Kop aktif 14.080 Σ Kop 22.803		
		Usaha Mikro , Kecil dan Menengah	Proporsi UMKMi aktif terhadap jumlah koperasi di seluruh kab/kota		100 %	100 %	100 %	100 %		100 %	100 %				100 %	100 %	Σ UMK 8.722.846 (2010)		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Tantangan utama perekonomian daerah Jawa Barat Tahun 2012 secara internal adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh yang disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoks pembangunan ekonomi dapat ditekan. Tantangan utama tersebut melahirkan tantangan turunan yang terkait dengan pencapaian efisiensi dan produktivitas ekonomi sektoral sesuai kapasitasnya, mendorong pembangunan wilayah pedesaan dan meningkatkan keterkaitan ekonomi desa-kota, meningkatkan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sumberdaya ekonomi produktif.

Membaiknya ekonomi dunia tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan daerah Jawa Barat. Selain itu keunggulan daerah yang membentuk kapasitas ekonomi untuk tumbuh cukup positif akan turut memperkuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan Tahun 2012.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi Koperasi dan UMKM di Jawa Barat yang mencapai 25.252 Unit Koperasi dan 9.166.503 unit UMKM pada Tahun 2012 dengan rata-rata kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 54,55%. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu masih rendahnya kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya akses pembiayaan, akses pasar, pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi sehingga berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Adapun potensi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sehingga peranan KUMKM dalam perekonomian regional dapat ditingkatkan lagi, melalui berbagai pendukung, dapat digambarkan kondisi eksisting pada tahun 2015 sebagai berikut :

1. Jumlah Koperasi	:	25.741 unit
2. Koperasi Aktif	:	16.855 unit
3. Jumlah Anggota	:	5.974.375 orang
4. Koperasi RAT	:	6.697 unit
5. Manajer	:	2.633 orang
6. Jumlah Karyawan	:	54.642 orang
7. Volume Usaha	:	Rp.21.157.522.697.460,-
8. Asset	:	Rp. 50.410.074.471.340,-
9. SHU	:	Rp. 1.849.061.344.920,-

Nilai Tambah Bruto (NTB) dan Peranan UKM terhadap PDRB menurut skala usaha (tanpa migas) adalah seperti dalam tabel berikut :

Tabel 6. Peranan UKM Terhadap PDRB menurut Skala Usaha (Tanpa Migas) Tahun 2010 – 2012 (persen)

Skala Usaha	2010	2011	2012
UMKM	53,68	54,20	54,55
Usaha Besar	46,32	45,80	45,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , 2013.

Tugas pemberdayaan pengembangan KUMKM tidak saja menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jawa Barat, tapi perlu juga didukung oleh pemangku kepentingan lainnya, baik gerakan koperasi, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, asosiasi, dan BUMN / Swasta. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan identifikasi yang berkaitan dengan dukungan pemangku kepentingan dimaksud.

Pemangku kepentingan (pelanggan eksternal) terdiri dari 24.252 unit koperasi dan 9,1 juta unit UMKM. Bagi KUMKM, harapannya agar ada fasilitasi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas SDM, akses permodalan, pasar, kemitraan, informasi dan teknologi, dengan prioritas peningkatan kapasitas SDM dan permodalan. Selain itu, UMKM juga mengharapkan agar ada iklim usaha yang kondusif. *Stakeholder* terdiri atas Dewan Koperasi Wilayah, Kamar Dagang dan Industri Daerah, Lembaga Keuangan (Bank dan Non Bank), DPRD, dan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Dekopinwil memiliki ekspektasi dan prioritas agar dilibatkan dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan. KADINDA mengharapkan sekaligus agar diprioritaskan pada efisiensi dan transparansi pelayanan birokrasi. Lembaga keuangan, khususnya perbankan berharap dan diberikan prioritas pada pembinaan KUMKM agar *bankable*. DPRD mengharapkan sekaligus agar

diprioritaskan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, dan instansi lainnya yang terkait mengharapkan dan agar diberi prioritas pada koordinasi yang efektif dan sinergis.

Pencermatan lingkungan Internal (PLI) mengidentifikasi adanya kekuatan, dan kelemahan. Pencermatan lingkungan eksternal (PLE) mengidentifikasi adanya peluang-peluang, dan tantangan/ancaman. Adapun hasil pencermatan lingkungan seperti pada tabel dibawah. Faktor-faktor internal dan eksternal kemudian dianalisis dengan memberikan bobot masing-masing sesuai dengan tingkat urgensinya. Setelah itu dirating untuk menentukan skornya, maka dapat dihasilkan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KA FE). Hasil identifikasi KAFI dipilih 3 (tiga) untuk faktor internal *kekuatan*, yaitu prioritas pertama (Adanya tenaga pendamping), kedua (Adanya balai Pelatihan bagi KUMKM), dan ketiga (Tersedianya data KUMKM potensial); faktor internal *kelemahan* dipilih 2 (dua), yaitu prioritas pertama (Kinerja aparatur belum optimal), dan kedua (Koordinasi dengan instansi lemah).

Tabel 7. Identifikasi Lingkungan *Strategic*

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Peluang (<i>Opportunities</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Balai Pelatihan bagi KUMKM 2. Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi 3. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan KUMKM yang Memadai 4. Sumber Dana Pemberdayaan Memadai 5. Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap KUMKM Tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Regulasi yang Mendukung KUMKM 2. Peluang Pengembangan Usaha Luas 3. Pasar KUMKM terbuka luas 4. Pembinaan dari Lembaga Keuangan untuk KUMKM 5. Dukungan dari berbagai <i>stakeholder</i> 6. Tersedianya tambahan modal untuk pemberdayaan koperasi dari perbankan dan Non Perbankan
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan SDM Aparatur KUMKM Belum Optimal 2. Belum ada <i>Roadmap</i> KUMKM Potensial 3. Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan KUMKM Belum merata 4. Pemanfaatan teknologi sistem informasi di KUMKM belum optimal 5. Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghadapi Era AFTA 2015 2. Administrasi usaha/pembukuan KUMKM 3. Citra Koperasi belum memasyarakat 4. Teknologi masih Sederhana di KUMKM 5. Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM KUMKM 6. Rendahnya produktivitas tenaga kerja KUMKM 7. Sertifikasi Produk masih kurang

Internal Strategic Factor Summary (IFAS)				
Faktor Strategis Internal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
A. Kekuatan				
Memiliki Balai Pelatihan Bagi KUMKM	0.09	3	0.27	Saat ini banyak KUMKM yang mengharapkan fasilitas dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM mereka, dengan adanya balai pelatihan yang dimiliki Dinas KUMKM maka memundahkan KUMKM untuk melatih dan mengembangkan SDM yang mereka miliki untuk meningkatkan kapasitasnya.
Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan tinggi	0.06	2.5	0.15	Dinas KUMKM memiliki personil dengan tingkat pendidikan tinggi yang pengetahuannya mampu digunakan untuk pengembangan KUMKM.
Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan KUMKM yang Memadai	0.11	3	0.33	Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas KUMKM bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia KUMKM melalui pelatihan, menambah pengetahuan KUMKM mengenai teknologi sistem informasi
Sumber Dana Pemberdayaan KUMKM Memadai	0.11	3.5	0.49	Pendanaan program menjadi pendorong keberlangsungan program-program pengembangan KUMKM. Dengan adanya sumber dana yang memadai memungkinkan Dinas KUMKM untuk melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan.
Komitmen Pemerintah Provinsi terhadap KUMKM Tinggi	0.12	3	0.36	Komitmen pemerintah menjadikan
B. Kelemahan				
Pemberdayaan SDM Aparatur KUMKM Belum Optimal	0.09	3	0.27	Pembagian tugas fungsional personil tidak merata sehingga beberapa fungsi kekurangan sumber daya dan menghambat proses kerja Dinas KUMKM
Belum Ada <i>Roadmap</i> KUMKM Potensial	0.1	3	0.3	<i>Roadmap</i> yang dijadikan acuan saat ini masih belum mampu mewujudkan tujuan Dinas KUMKM secara optimal.
Pendistribusian Sumber Dana Pemberdayaan KUMKM Belum Merata	0.12	3.5	0.42	Pendistribusian dana pada KUMKM yang tidak merata menyebabkan pengembangan KUMKM yang tidak merata juga.
Penggunaan Teknologi Sistem Informasi di KUMKM Belum Optimal	0.09	3	0.27	Penggunaan teknologi dan sistem informasi yang belum optimal menyebabkan KUMKM kalah dalam persaingan di pasar.
Sinergisitas dengan Instansi lain dan Daerah Belum Optimal	0.08	3	0.24	Sinergisitas dengan instansi diperlukan terutama untuk memudahkan proses administratif. Jika sinergisitas kurang maka menghambat proses pengembangan KUMKM
TOTAL	1		3.1	

A. External Strategic Factor Summary (EFAS)				
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
A. Peluang				
Adanya Regulasi yang Mendukung KUMKM	0.05	3	0.15	Dengan adanya regulasi yang mendukung KUMKM maka kebijakan yang diambil pemerintah akan menguntungkan bagi pengembangan KUMKM
Peluang Pengembangan Usaha Luas	0.07	3	0.21	
Pasar KUMKM terbuka luas	0.07	3	0.21	
Pembinaan dari Lembaga Keuangan	0.11	3.5	0.385	Pembinaan dari lembaga keuangan memungkinkan menjadi <i>bankable</i> sehingga KUMKM lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank sebagai tambahan modal usaha
Dukungan dari berbagai <i>stakeholder</i>	0.05	2	0.12	Keinginan berbagai <i>stakeholder</i> untuk terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan untuk KUMKM menandakan adanya upaya dari <i>stakeholder</i> untuk menjadikan KUMKM lebih tumbuh
Tersedianya tambahan modal dari perbankan dan Non Perbankan	0.12	3.5	0.42	Ketersediaan tambahan modal dari perbankan maupun non perbankan dapat digunakan untuk berbagai program pengembangan KUMKM dari Dinas KUMKM maupun untuk kegiatan operasional KUMKM itu sendiri
B. Ancaman				
Menghadapi Era AFTA 2015	0.09	3.5	0.315	KUMKM harus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya jika tidak ingin kalah bersaing dengan produk-produk yang berasal dari anggota AFTA lainnya.
Administrasi usaha/pembukuan KUMKM	0.06	2.5	0.15	
Citra Koperasi belum memasyarakat	0.05	2.5	0.125	Masyarakat Indonesia masih menganggap produk-produk koperasi kurang berkualitas dibandingkan produk-produk perusahaan multinasional maupun global
Teknologi masih Sederhana di KUMKM	0.08	3	0.24	Teknologi yang kurang canggih bisa menghambat proses kerja dan KUMKM
Rendahnya Jiwa Kewirausahaan dan Keterampilan SDM KUMKM	0.09	3.5	0.315	Kurangnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan yang dimiliki SDM KUMKM menjadikan KUMKM kurang inovatif dalam pengembangan produk dan pembentukan strategi.

A. External Strategic Factor Summary (EFAS)				
Faktor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Skor	Keterangan
A. Peluang				
Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja KUMKM	0.08	3.5	0.28	Produktivitas yang rendah berpengaruh kepada profitabilitas kecil KUMKM dan menjadi hambatan bagi pengembangan usaha
Sertifikasi Produk masih kurang	0.07	2.5	0.175	Kurangnya produk bersertifikasi mengurangi pula kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk-produk KUMKM.
TOTAL	1		3.095	

Hasil identifikasi KAFE dipilih 3 (tiga) untuk faktor eksternal *peluang*, yaitu prioritas pertama (Potensi usaha KUMKM besar), kedua (Komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan KUMKM), dan ketiga (Tersedianya dana perbankan). Faktor eksternal *ancaman* dipilih 2 (dua), yaitu prioritas pertama (Lemahnya SDM KUMKM), dan kedua (Administrasi usaha KUMKM belum tertata baik).

Untuk sampai pada rumusan faktor kunci keberhasilan maka terlebih dahulu dirumuskan asumsi strategi melalui analisis SWOT dengan memanfaatkan KAFI dan KAFE. Terdapat empat kategori asumsi strategi; kekuatan dipakai untuk memanfaatkan peluang (SO), kekuatan dipakai untuk menghadapi ancaman (ST), kelemahan ditanggulangi dengan memanfaatkan peluang (WO), dan harus ada upaya memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman (WT). Asumsi-asumsi strategi yang dihasilkan kemudian divalidasi dengan menggunakan metode *Critical Strategic Issue Analysis* (CSIA) untuk menghasilkan *Critical Strategic Factors* (CSF) atau FKK. Hasil analisis terpilih 4 (empat) FKK, yaitu :

1. Pemanfaatan tenaga pendamping guna menggali potensi usaha KUMKM;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pemanfaatan potensi usaha KUMKM sebagai acuan dalam program peningkatan permodalan KUMKM;
3. Mengoptimalkan kinerja aparatur melalui fasilitasi pemberdayaan bagi KUMKM sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pengembangan KUMKM;
4. Meningkatkan SDM KUMKM melalui pelatihan pada Balai Pelatihan KUMKM.

Selanjutnya dilakukan analisis untuk menentukan urutan FKK, yaitu dengan menggunakan Uji LITMUS yang mengkaitkan dengan visi, misi, dan nilai, dan Uji SWOT yang mengkaitkan dengan unsur-unsur kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka pendudukan yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki KUMKM sehingga KUMKM dapat lebih berkembang dan berdaya saing baik tingkat nasional maupun internasional, meliputi antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM
3. Peningkatan Akses Pasar KUMKM
4. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Teknologi bagi KUMKM
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Usaha Koperasi
6. Penguatan Jatidiri Koperasi
7. Peningkatan Kualitas Koperasi
8. Penumbuhan Motivasi Berkoperasi
9. Pengawasan dan Pengendalian Program Pemberdayaan KUMKM
10. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM
11. Peningkatan Jaringan Usaha dan Kemitraan
12. Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha
13. Peningkatan Kesempatan Kerja
14. Fasilitasi Pembiayaan bagi KUMKM
15. Penguatan Tatakelola dan Jaringan Koperasi
16. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi KUMKM
17. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
18. Visualisasi Koperasi dan UMKM Jawa Barat

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Tabel 8. Komparasi Capaian Sasaran RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Terhadap Sasaran RENSTRA Kementerian KUMKM

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jabar	Sasaran pada Renstra OPD Lingkup Koperasi Kab/Kota	Sasaran pada Renstra Kementerian KUMKM RI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Koperasi Aktif (koperasi/tahun)	Jumlah Lembaga Koperasi yang berkualitas (1.100 Koperasi/tahun)	Peningkatan Jumlah Koperasi aktif (10%/thn)	Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun 7,5 – 10,0%)
		Jumlah Peningkatan kapasitas SDM KUMKM (4.600 Orang/tahun)	Peningkatan kualitas SDM KUMKM (10%/thn)	
2.	Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha (kumulatif selama 5 tahun)	Jumlah UMKM yang telah Memiliki Legalitas Usaha		Jumlah UMKM dan koperasi yang telah menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 50.000 unit)
				Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)
3.	Jumlah UMKM yang telah Memasuki Pasar Internasional (Ekspor) (kumulatif selama 5 tahun)	Pengembangan Akses Pasar (534 KUMKM/tahun)	Peningkatan Pemasaran Produk KUMKM (20%/thn)	Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun sebesar 5,0 – 7,0%)
4.	Persentase Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (rata-rata / tahun)	Sarana dan Prasarana bagi KUMKM (50 KUMKM/tahun)		Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun 6,5 – 7,5%)
		Akses Teknologi Tepat Guna (1.040 KUMKM/tahun)		Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun sebesar 4,0 – 5,5%)
5.	Prosentase Koperasi yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/th)	Akses Permodalan (200 KUMKM/tahun)	Peningkatan Akses Pembiayaan (20%/thn)	Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019 sebesar 55,0%)
6.	Prosentase UMKM yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/th)			Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019 sebanyak 25,0%)
7.	Jumlah Wirausaha Baru (kumulatif selama 5 tahun)	Jumlah wirausaha baru/WUB (1.500 Orang/tahun)	Pengembangan WUB	Pertambahan jumlah wirausaha baru-melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun sebanyak 1 juta unit)
8.	Porsentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (jumlah/tahun)	Jumlah wirausaha berdaya saing (100%/tahun)		

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat tingkat capaian sasaran Dinas Koperasi dan UMKM provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan sasaran RENSTRA Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dan RENSTRA OPD Lingkup Koperasi Kabupaten/Kota. Indikator kinerja yang digunakan, terlihat adanya keserasian atau sinkronisasi pada hal pemberdayaan koperasi dan UMKM, peningkatan daya saing produk, pemasaran produk UKM dan perluasan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM serta penciptaan Wirausaha Baru. Penentuan indikator pada Renstra Kementerian Koperasi dan UKM didasarkan pada sasaran dan arah kebijakan RPJMN tahun 2015 – 2019 di bidang UMKM dan Koperasi, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi dalam perkenomian
2. Meningkatnya daya saing UMKM
3. Meningkatnya usaha baru
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi

Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, bahwa agenda prioritas presiden dan wakil presiden terpilih (Nawa Cita) yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penjabaran Nawa Cita terkait UMKM dan Koperasi pada Tahun 2015 – 2019, khususnya pada point ke 6 yaitu “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dituangkan kedalam 4 (empat) strategi yaitu : (1) Strategi peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; (2) Strategi peningkatan kualitas SDM; (3) Strategi peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; (4) Strategi penguatan kelembagaan usaha. Selain itu penjabaran pada poin ke 7 yaitu “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” dituangkan kedalam strategi peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema usaha.

Hasil telaahan struktur ruang wilayah Provinsi Jawa Barat pada RTRW Provinsi Jawa Barat 2009 – 2029, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Telaah Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

N o	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan infrastruktur telekomunikasi	Struktur ruang mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi	Pengembangan Jabar <i>Cyber Koperasi</i>	Pengembangan Jabar <i>Cyber Koperasi</i> yang dikelola di kantor Dinas	-
2	Pengembangan infrastruktur pemukiman	Pengembangan infrastruktur perkotaan dan pedesaan di Jawa Barat	Pengembangan <i>Home Indstry</i>	Pengembangan Koperasi UMKM di wilayah unggulan	Wilayah pengembangan <ul style="list-style-type: none"> - Bodebekpunjur - Purwasuka - Ciayumajakuning - Priangan Timur-Pangandaran - Sukabumi - KK Cekungan Bandung;

Berdasarkan hasil analisa Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan kebutuhan pelayanan OPD sebagai berikut :

Tabel 10. Telaah Pola Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan lokasi industri	Pengembangan infrastruktur industri kecil di Jawa Barat	Lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah	Penyediaan/ pembebasan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah	Wilayah pengembangan (di luar kawasan industri) <ul style="list-style-type: none"> - Bodebekpunjur - Purwasuka - Ciayumajakuning - Priangan Timur-Pangandaran - Sukabumi - KK Cekungan Bandung

Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Analisa Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan OPD	Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan kelembagaan koperasi, agar dapat mendorong investasi pelaku usaha besar - Diperlukan sarana promosi produk Koperasi dan UMKM bagi kawasan tertentu bagi pelaku KUMKM 	Program Sistem Pendukung KUMKM
2	Pengembangan dayadukung dan daya tampung wilayah kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;	Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa;	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan SDM pelaku Koperasi dan UMKM yang kreatif dan berdaya saing - Diperlukan pembiayaan yang membantu pelaku KUMKM 	Program Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap pelayanan OPD	Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan Kawasan khusus pengembangan industri kecil	<ul style="list-style-type: none"> - Diperlukan kelembagaan koperasi, agar dapat mendorong investasi pelaku usaha besar membantu industri kecil - Diperlukan sarana promosi produk Koperasi dan UMKM bagi kawasan tertentu bagi pelaku KUMKM 	Program Sistem Pendukung KUMKM

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dalam konstelasi nasional maupun daerah, keberadaan Koperasi dan UMKM telah menunjukkan peranannya yang cukup baik, namun masih banyak hambatan dan kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal sehingga Koperasi dan UMKM belum berkembang secara optimal, untuk itu perlu diberikan prioritas utama dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Barat.

Prioritas utama tersebut haruslah bersifat selaras dengan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun implementasi program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk pengembangan kebijakan, penguatan, fasilitasi, pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UMKM. Adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM.

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam kualitas pelayanan OPD, terkait tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat terilustrasikan sebagaimana pada tabel 13, Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

**Tabel 12. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Barat**

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan OPD	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Jumlah Koperasi Aktif (400 kop/th)	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam pengembangan KUMKM di Jawa Barat	Citra koperasi yang belum memasyarakat	Belum ada roadmap pengembangan KUMKM potensial
		Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha	Koordinasi dengan Kab/Kota didalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan UMKM di Jawa Barat dengan sumber alokasi dana APBD maupun APBN	Kemampuan untuk mengembangkan jiwa enterpreneur dari UMKM sehingga mampu berkembang dengan baik	Perlu Pola Pengembangan UMKM secara menyeluruh dari berbagai aspek
	Peningkatan Pertumbuhan KUMKM	Jumlah UMKM yang Telah Memasuki Pasar Internasional (Ekspor) (20 UMKM/Th)	Peningkatan pemasaran produk UMKM	Iklm Investasi yang Kurang Mendukung Pengembangan UMKM	Pemanfaatan Sistem Informasi dan Jaringan yang harus Lebih Optimal
		Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (5%/Th)	Ketersediaan Program/Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Rendahnya produktivitas SDM Koperasi terutama dalam Mendukung Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal
	Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Prosentase Koperas yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/th)	Koordinasi dengan Kab/Kota didalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan UMKM di Jawa Barat dengan sumber alokasi dana APBD maupun APBN	Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja Koperasi	Sinergitas dengan instansi lain dan daerah belum optimal
		Prosentase UMKM yang Layak Memperoleh Akses Pembiayaan (5%/th)		Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja UMKM	
	Meningkatnya Minat Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru (1.500 Org/Th)	Ketersediaan dukungan anggaran	Pelaksanaan administrasi usaha/pembukuan KUMKM yang belum memadai	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal
	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Prosentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (100%/Th)	Program dan Kegiatan dalam Rangka Pendampingan dan Pembinaan bagi Wirausaha Baru yang telah Dilatih	Rendahnya Kemampuan untuk Meningkatkan Kemampuan Entrepreneur Wirausaha	Peningkatan Pembinaan dan Pendampingan bagi Wirausaha Baru

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD	
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Kajian Renstra OPD Lingkup Koperasi Kab/Kota	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Peningkatan Koperasi Aktif (10%/th)	Koordinasi dengan Kab/Kota didalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan KUMKM di Jawa Barat dengan sumber alokasi dana APBD maupun APBN	Citra koperasi yang belum memasyarakat	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal	
		Peningkatan kualitas SDM KUMKM (10%/th)		Teknologi yang masih sederhana di KUMKM	Pendistribusian sumber dana pemberdayaan KUMKM belum merata	
		Peningkatan Pemasaran Produk KUMKM (20%/th)		Rendahnya produktivitas tenaga kerja KUMKM	Belum ada roadmap pengembangan KUMKM potensial	
	Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Rendahnya produktivitas tenaga kerja KUMKM				
	Meningkatnya Minat Wirausaha	pengembangan WUB di Kab/Kota		Koordinasi dengan Kab/Kota didalam rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan KUMKM di Jawa Barat dengan sumber alokasi dana APBD maupun APBN	Pelaksanaan administrasi usaha/pembukuan KUMKM yang belum memadai	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal
	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Prosentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (100%/Th)			Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM KUMKM	
Kajian Renstra K/L	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Peningkatan jumlah dan peran koperasi dan UMKM (10%) dan tumbuh koperasi aktif (5%)	Koordinasi dengan Kab/Kota didalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan KUMKM di Jawa Barat dengan sumber alokasi dana APBN Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam pengembangan KUMKM di Jawa Barat	Keberpihakan Pemerintah didalam Mendukung Upaya Pengembangan Koperasi dan UMKM	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal	
	Peningkatan Pertumbuhan KUMKM	Peningkatan produktivitas UMKM (5%/th)		Memperbaiki Iklim Usaha bagi Hasil Produk KUMKM	Sinergitas dengan instansi Kab/Kota belum optimal	
	Terbukanya Akses Pembiayaan bagi KUMKM	Peningkatan Pembiayaan bagi KUMKM		Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Pembiayaan yang Mendukung Pengembangan KUMKM	Pembinaan Manajemen sehingga KUMKM Mampu Mengakses Fasilitas Pembiayaan	
	Meningkatnya Minat Wirausaha	Pengembangan wirausaha koperasi dan UMKM dari kalangan sarjana (5.000 orang)		Masih Kurangnya Minat Masyarakat untuk Menjadi Wirausaha Baru tanpa Adanya Bantuan Modal/Stimulan dalam Pembukaan Usaha	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Baru sehingga Mampu Bersaing	
	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru					

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kajian RTRW	Wilayah pengembangan diluar kawasan industri : Bodebekpunjur; Purwasuka; Ciayumajakuning; Priangan Timur - Pangandaran; Sukabumi; KK Cekungan Bandung	Pengembangan Jabar Cyber Koperasi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan Jabar Cyber Koperasi yang dikelola di kantor Dinas	Penyediaan/pembebasan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah	Koordinasi dengan Kab/Kota untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan KUMKM di wilayah pengembangan khususnya di luar kawasan industri
		Pengembangan Home Industry	Penentuan lokasi pengembangan KUMKM di wilayah unggulan		
		Pengembangan Infrastruktur Industri Kecil di Jawa Barat			
Kajian KLHS	Mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan/jasa	Pengembangan KUMKM di Jawa Barat	Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam pengembangan KUMKM di Jawa Barat	Rendahnya jiwa kewirausahaan dan keterampilan SDM KUMKM	Pemberdayaan SDM aparatur masih belum optimal didalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan KUMKM di Jawa Barat
	Memprioritaskan investasi untuk mengembangkan kawasan khusus pengembangan industri kecil		Memiliki sarana prasarana balai pelatihan	Rendahnya produktivitas tenaga kerja KUMKM	Pendistribusian sumber dana pemberdayaan KUMKM belum merata
			Memiliki SDM potensial dengan tingkat pendidikan yang memadai		Penggunaan teknologi dan sistem informasi di KUMKM belum optimal
					Sinergitas dengan instansi Kab/Kota belum optimal
					Pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk KUMKM

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan visi terbaru yaitu *“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”*.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi diantaranya adalah *“Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan melalui Penguatan Ekonomi*

Perdesaan dan Regional“ hal ini untuk menciptakan sosok perekonomian Jawa Barat tahun 2018 yaitu ekonomi Jawa Barat yang kompetitif dengan memanfaatkan keunggulan komperatif, kokoh dan berkeadilan.

Peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sebagai penggerak perekonomian untuk tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah dengan sasaran meningkatnya daya saing usaha KUMKM melalui peningkatan kemampuan KUMKM dalam mengembangkan produk kreatif, inovatif, berkualitas dan meningkatkan penggunaan produk KUMKM dalam negeri. Pemberdayaan KUMKM perlu dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas – luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi KUMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi yang dikaitkan dengan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun anggaran dalam pemberdayaan dan pengembangan KUMKM telah menetapkan visi dan misi organisasi dengan tujuan dapat merumuskan kebijakan operasional di bidang perkoperasian dan UMKM. Melalui visi dan misi dan UMKM diharapkan organisasi dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku KUMKM.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan sebagaimana dalam tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih yang terkait dengan pelayanan OPD	Permasalahan Utama Bidang KUMKM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 2 : Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan Program : - Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM - Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM	- Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.	- Tenaga pengajar/ penyuluh/ pendamping masih terbatas - Kurangnya minat anggota koperasi untuk meningkatkan kapasitas.	- Memiliki UPTD balai pelatihan; - Memiliki kurikulum; - Revitalisasi DIKLAT
		- Rendahnya Kelembagaan, SDM, akses pembiayaan, akses pasar.	- Belum adanya SPM dan SOP pemberdayaan KUMKM; - Kelayakan usaha pelaku UMKM masih rendah; - Belum terbentuknya BLUD yang mengelola dana bergulir dan pemasaran	- Tersedianya Regulasi pemberdayaan KUMKM; - Fasilitas gedung pemasaran sudah tersedia (gedung SENBIK) - Terjalinnya MOU dengan P3UKM Bank Indonesia dalam rangka pendampingan pembiayaan
		- Penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan teknologi Informasi	- Akses terhadap TTG belum terjangkau; - Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah	- Telah memiliki Website Jabar Cyber Koperasi; dan diskumkm.Jabarprov.go.id - Telah memiliki paviliun di lima kab/kota
		- Daya saing, inovasi dan pengembangan produk KUMKM lebih rendah di bandingkan dengan produk impor	- Terbatasnya penyediaan peningkatan daya saing KUMKM - Pemanfaatan teknologi belum optimal - Kreasi dan inovasi produk KUMKM masih rendah	- Event promosi tahunan "Cooperative fair" - Paviliun KUMKM Jabar di SME Tower di Jakarta - Fasilitas pelatihan teknis substantif produk KUMKM

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi/Kabupaten/Kota

Analisis komparasi antara Renstra Kementerian KUKM RI dengan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dibuat bertujuan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan untuk mengidentifikasi capaian sasaran, sebagaimana terlihat dalam tabel 14.

Tabel 14. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KUKM RI Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kelembagaan Koperasi	Terbatasnya kewenangan pembinaan dan sistem pembelanjaan APBD (BL dan BTL)	Terbatasnya kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota	Sinergitas program pemberdayaan KUMKM tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
2.	SDM KUMKM	Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perkoperasian	Tingginya rotasi & mutasi SDM yg berkompeten dalam bidang Koperasi di Kab/Kota	Pemberdayaan Koperasi merupakan urusan wajib
3.	Pembiayaan KUMKM	Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang perbankan	Terbatasnya kemampuan SDM aparatur di bidang perbankan	Mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keuangan
4.	Pemasaran produk KUMKM	Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses pasar	Terbatasnya pengembangan saluran media untuk akses pasar	Mengembangkan hubungan interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha KUMKM
5.	Pemberdayaan KUMKM	Alokasi anggaran belanja bidang ekonomi masih relatif kecil	Kepedulian pada sektor KUMKM masih rendah	Terjalinnnya hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM
6.	Aspek Legalitas Usaha KUMKM	Terbatasnya alokasi anggaran untuk fasilitasi legalitas produk KUMKM	Kewenangan dalam mengeluarkan legalitas usaha	Terjalinnnya hubungan antar stakeholder dalam pemberdayaan KUMKM

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisa Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat 2009-2029, dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Permasalahan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM berdasarkan Telaahan Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan struktur pemukiman bagi <i>home industry</i> untuk dikembangkan menjadi lokasi industri	Alih fungsi lahan menjadi lokasi industri bagi IKM bukan menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Prov Jawa Barat	a. Pertumbuhan pendudukan Jawa Barat yang setiap tahun meningkat serta tingkat urbanisasi penduduk dari Luar Jawa Barat semakin meningkat b. Pemanfaatan Teknologi ramah lingkungan yang berkelanjutan bagi IKM masih belum optimal c. Pemangku kebijakan dalam hal penyediaan lahan bagi pemukiman dan lokasi industri belum memperhatikan peraturan yang ada khususnya dalam penyelesaian lahan basah	1. Dijadikan RTRW provinsi sebagai dasar penyusunan RTRW Kab/Kota 2. Jumlah IKM yang semakin meningkat setiap tahunnya

Berdasarkan analisa RTRW Provinsi Jawa Barat dalam PERDA Provinsi Jawa Barat No 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029, dalam Bab VII Pasal 54-60, diperlukan strategi untuk pengembangan agribisnis, agroindustri, industri kreatif, perikanan, pertambangan dan pariwisata.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis pemberdayaan KUMKM merupakan permasalahan yang akan diselesaikan 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2013-2018) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2008-2013), dan perlu penyelesaian secara bertahap. Permasalahan utama pemberdayaan KUMKM, meliputi antara lain :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi;
2. Rendahnya kelembagaan, SDM, akses pembiayaan dan akses pasar;
3. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), dan teknologi informasi;
4. Daya saing produk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor.

Kebijakan bidang Koperasi dan UMKM diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu “Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan” dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing usaha KUMKM;
3. Perkuatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Dari ketiga sasaran tersebut diatas, maka sasaran kedua merupakan sasaran yang terkait langsung dengan Pembangunan Bidang Koperasi dan UMKM, yaitu: “*Meningkatnya Daya Saing Usaha KUMKM*”. Untuk meningkatkan daya saing usaha KUMKM, diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Kelembagaan serta perlindungan dan dukungan usaha.
- b. Peningkatan kapasitas SDM, akses Pasar, akses Pembiayaan, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan teknologi informasi.

Tabel 16. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi	0	20	25	25	35	20	20	145
2.	Kapasitas SDM KUMKM	30	0	25	25	25	15	30	150
3.	Akses pembiayaan bagi KUMKM;	25	25	0	20	25	25	35	155
4.	Akses pemasaran produk KUMKM;	25	25	30	0	30	15	35	160
5.	Iklim usaha yang mendukung KUMKM;	15	25	25	20	0	15	25	115
6.	Daya saing produk KUMKM.	30	30	25	20	35	0	30	170
7.	Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan teknologi informasi	20	20	15	15	25	20	0	135

Upaya pengembangan KUMKM dalam perjalanannya tidak terlepas dari isu-isu strategis yang dihadapi. Isu-isu strategis tersebut harus dapat diidentifikasi sehingga pengembangan KUMKM tidak mengalami stagnasi atau kemunduran. Berdasarkan identifikasi skala kriteria isu strategis bidang KUMKM, sebagaimana dalam tabel diatas, maka diperoleh hasil isu strategis yang tertinggi yaitu daya saing produk KUMKM. Hal ini berkaitan dengan rendahnya daya saing dengan produk impor disebabkan oleh rendahnya inovasi dan kreatifitas pelaku KUMKM.

Selain rendahnya daya saing, hal utama yang menjadi permasalahan bidang KUMKM adalah rendahnya akses pembiayaan dan rendahnya fungsi pemasaran bagi pelaku KUMKM, khususnya untuk promosi.

Tabel 17. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi	145	20,71
2.	Kapasitas SDM KUMKM	150	21,43
3.	Akses pembiayaan bagi KUMKM;	155	22,14
4.	Akses pemasaran produk KUMKM;	160	22,86
5.	Iklm usaha yang mendukung KUMKM;	115	16,42
6.	Daya saing produk KUMKM.	170	24,30
7.	Pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dan teknologi informasi	135	19,28

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Perumusan Visi Dinas Koperasi dan UMKM menganut SMART Planning (*Specific, Measurable, Achievable, Resources, Time*) artinya dalam perumusan Visi harus jelas, terukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh dinas pada akhir periode perencanaan, yang memberikan gambaran selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi, dapat memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, fleksibel, konsisten dalam pencapaiannya harus spesifik artinya simpel dan jelas agar mudah diingat. Sedangkan Misi merupakan sasarannya yang harus dilakukan dinas pada tahun rencana dalam rangka mencapai visi dinas.

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013 – 2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu – isu strategis yang terjadi di Jawa Barat tahun 2013 – 2018, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan Visi yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan melalui Profesionalisme tatakelola dan Perluasan Partisipasi Publik;
4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan Pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan;

5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran Pemuda, Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata dalam bingkai kearifan lokal

Berpijak pada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kebijakan, Program dan Janji Gubernur pada Pembangunan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan selama periode tahun 2013-2018, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan operasional dibidang perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah, maka ditetapkan Visi dengan variabel kunci "meningkatkan daya beli masyarakat" yaitu: "Menjadi OPD Handal dalam Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing"

Pengertian dari Visi tersebut di atas adalah :

1. Berkualitas, artinya Koperasi dan UMKM Jawa Barat yang mampu menghasilkan produk unggulan dengan pengelolaan berdasarkan sistem manajemen profesional.
2. Berdaya saing tinggi, artinya Koperasi dan UMKM di Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif (*core competency*) baik di tingkat nasional dan internasional; Koperasi dan UMKM di Jawa Barat memiliki *market share* relatif besar untuk produk-produk unggulan Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia untuk produk-produk UMKM di pasar nasional dan internasional.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dilakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang sekaligus mencerminkan *value* organisasi, melalui misi sebagai berikut :

1. Membangun SDM UMKM dan Koperasi yang Berdaya Saing
2. Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat
3. Mengembangkan Koperasi dan Usaha UMKM Jawa Barat
4. Meningkatkan Partisipasi Wirausaha dalam Perekonomian Jawa Barat
5. Membangun Wirausaha Jawa Barat yang Tangguh

Adapun penjelasan misi adalah sebagai berikut :

Misi		Penjelasan
Misi 1	Membangun SDM UMKM dan Koperasi yang Berdaya Saing	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan aparatur/petugas dan pelaku koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
Misi 2	Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat	Meningkatkan kemampuan kelembagaan Koperasi dan UMKM sehingga mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi tepat guna oleh Koperasi dan UMKM
Misi 3	Mengembangkan Koperasi dan Usaha UMKM Jawa Barat	Meningkatnya kemampuan pemasaran dan permodalan koperasi dan UMKM melalui fasilitasi akses pemasaran, akses pembiayaan dan teknologi bagi KUMKM
Misi 4	Meningkatkan Partisipasi Wirausaha dalam Perekonomian Jawa Barat	Meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk menjadi wirausaha baru, sehingga mampu berperan penting didalam membangun perekonomian Jawa Barat
Misi 5	Membangun Wirausaha Jawa Barat yang Tangguh	Meningkatnya kemandirian dan daya saing Wirausaha Jawa Barat melalui pendampingan dan pembinaan sehingga mampu meningkatkan kualitas produk agar produk berdaya saing

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Kebijakan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu "Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan", dengan tujuan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;
2. Meningkatnya daya saing usaha KUMKM;
3. Perkuatan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional;

Dari ketiga sasaran tersebut diatas, maka sasaran **kedua** merupakan sasaran yang terkait langsung dengan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM, yaitu "**Meningkatnya daya saing usaha KUMKM**".

Tujuan, sasaran serta indikator sasaran jangka menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 18. Tujuan, Sasaran, Serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran ke				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kapasitas KUMKM	Peningkatan Kapasitas KUMKM	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	15.000	16.078	16.478	16.878	17.278
			Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	180	224	267	320	384
2.	Meningkatkan produktivitas KUMKM	Meningkatnya Pertumbuhan KUMKM	Presentase Peningkatan Omzet UMKM (%)	3	5	5	5	5
			Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	3	5	5	5	5
3.	Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM	Terbukanya Akses Pembiayaan Bagi KUMKM	Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)	4	6	8	10	12
			Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	17	19	21	23	25
4.	Meningkatkan Minat Wirausaha Baru	Meningkatnya Minat Wirausaha	Jumlah Wirausaha Baru	300	1.800	3.300	4.800	6.300
5.	Meningkatkan Kapasitas Wirausaha Jawa Barat	Meningkatnya Kemampuan Wirausaha Baru	Prosentase Wirausaha Baru yang menjadi Pelaku Usaha	100	100	70	60	60

4.2. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Berpedoman pada visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, maka disusun strategi dan kebijakan untuk pengembangan koperasi dan UMKM di Jawa Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 19. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Barat**

VISI : MENJADI OPD HANDAL DALAM MEWUJUDKAN KOPERASI DAN UMKM YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING			
Misi 1 : Membangun SDM UMKM dan Koperasi yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas KUMKM	Peningkatan kapasitas KUMKM	Meningkatkan kapasitas SDM KUMKM	Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM KUMKM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
		Meningkatkan kualitas kelembagaan	Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM aparatur KUMKM melalui pendidikan dan pelatihan
Misi 2 : Membangun Produktivitas Koperasi dan UMKM Jawa Barat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	Meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha	Menciptakan dan meningkatkan akses pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM
		Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUMKM	Meningkatkan pembinaan dan mendorong pemanfaatan teknologi tepat guna bagi KUMKM
Misi 3 : Mengembangkan Usaha Koperasi dan Usaha UMKM Jawa Barat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM	Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM	Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM	Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui penyampaian informasi, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan pembiayaan bagi KUMKM

Misi 4 : Meningkatkan Partisipasi Wirausaha dalam Perekonomian Jawa Barat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Minat Wirausaha Jawa Barat	Meningkatnya minat wirausaha baru	Meningkatnya akses informasi penciptaan wirausaha	Meningkatkan pemanfaatan berbagai media komunikasi untuk diseminasi informasi wirausaha baru
Misi 5 : Membangun Wirausaha Jawa Barat yang Tangguh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kapasitas wirausaha Jawa Barat	Meningkatnya kemampuan wirausaha baru	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha baru	Meningkatkan kemampuan wirausaha baru melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan
			Meningkatkan pembinaan dan pendampingan wirausaha baru yang telah dilatih

Terkait dengan hal tersebut di atas Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun kedepan menetapkan Program, yaitu :

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan UMKM;
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Koperasi dan UMKM;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat merupakan program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat. Rencana program beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program, *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan – kegiatan dalam satu program. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat menetapkan program dan kegiatan berdasarkan uraian prioritas sesuai isu strategis yang ada dan dikaitkan dengan sumber daya yang tersedia meliputi :

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. Terciptanya wirausaha baru
 - b. Tersedianya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM
 - c. Meningkatnya kapasitas wirausaha
 - d. Terbangunnya paviliun/gerai Program Pengembangan Sistem Pendukung bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengembangan pemasaran produk KUMKM
 - b. Meningkatnya tatakelola dan pendampingan modal usaha bagi koperasi dan UMKM
 - c. Meningkatnya akses pembiayaan bagi KUMKM
3. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
 - a. Meningkatnya pengembangan jaringan dan akses pasar KUMKM
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan koperasi,
 - b. Brekembangnya koperasi berskala besar.
 - c. Terwujudnya koperasi percontohan

Disamping program utama tersebut di atas yang mendukung secara langsung terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2014, juga terdapat 8 (delapan) program penunjang sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
6. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran
7. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1. Meningkatkan kapasitas KUMKM	Peningkatan Kapasitas KUMKM	1. Jumlah koperasi aktif (kumulatif Koperasi selama 5 tahun)				15.000		16.078		16.478		16.878		17.278		17.278				
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
			Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Jawa Barat																	
			Kegiatan																	
			Pelatihan Berbasis Akuntansi dan Manajerial Kewirausahaan bagi Pengelola Keuangan Koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi Keuangan Koperasi yang Dilatih	200	350	450	385	495	420	545	460	600	500	700	2.190	2.790			
			Penguatan Tatakelola Usaha Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina untuk penguatan usaha	-	-	-	-	-	-	-	500	2.500	550	3.000	550	3.000			
			Penguatan Tatakelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dibina kelembagaanya	1,100	1,500	2.483	1,750	3.412	2,000	4.094	2,250	4.913	2,500	5.896	2,500	21.160			
			Pengembangan Koperasi Skala Besar	Jumlah koperasi skala besar yang dibina	-	100	1.800	100	2.000	100	2.200	100	2.500	100	2.700	100	2.700			
			Penerapan Jatidiri Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan jatidiri koperasi	-	-	-	-	-	-	-	500	2.000	600	2.400	600	2.400			
		2. Jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha (kumulatif UMKM selama 5 tahun)			-			180		224		267		320		384		384		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif																
			Terciptanya iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif																
			Kegiatan																
			Pengembangan Jaringan Dan Akses Pasar Kumkm	Jumlah KUMKM yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pasar	437	500	3,327	600	3,993	700	4,791	800	5,750	1,000	6,900	1,000	24.761		
2. Meningkatkan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2. Meningkatkan pertumbuhan KUMKM	3. Persentase Kenaikan Omzet UMKM (%)				-		3		5		5		5		5			
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah																
			Berkembangnya KUMKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM																
			Kegiatan																
			Pameran Produk Kumkm	Jumlah Pameran yang dilaksanakan	3	3	417	6	1.147	8	1.550	9	1.700	10	1.900	36	6.714		
			Pengembangan Usaha Kumkm	Jumlah KUMKM yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Usaha	-	80	200	90	250	100	275	100	300	150	500	150	500		
		4. Pertumbuhan skala usaha koperasi (rata-rata pertumbuhan % / tahun)				3		5		5		5		5		5			
			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																
			Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Jawa Barat																

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan																
			Pengembangan Kelembagaan Ikan Air Tawar Dan Ikan Hias (Tkw 23)	Jumlah KUMK Ikan Air Tawar yang Dibina	-					25	250	50	550	60	650	60	650		
			Pengembangan Kelembagaan Padi Pandan Wangi (Tkw 13)	Jumlah KUMKM Padi Pandanwangi yang Dibina	-					120	250	250	400	250	440	250	440		
			Pengembangan Kelembagaan Industri Perberasan Dan Makanan (Tkw 23)	Jumlah KUMKM pada Industri Perberasan dan Makanan yang Dibina	-					120	250	250	400	250	440	250	440		
			Penguatan Kelembagaan Usaha Tikar Mendong	Jumlah Koperasi Tikar Mendong yang Dibina	-					2	225	6	400	6	440	6	440		
			DBHCHT : Pengembangan Dan Peningkatan Kelembagaan Dan Usaha KUMKM Tembakau	Jumlah KUMKM tembakau yang dibina melalui dana DBHCHT	-					200	2.500	500	4.700	500	5.000	500	5.000		
3. Meningkatkan Akses Pembiayaan KUMKM	3. Terbukanya akses pembiayaan bagi KUMKM	5. Persentase Kredit yang Diserap oleh Koperasi (%)				4		6		8		10		12		12			
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah																			
			Berkembangnya KUMKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM																
			Kegiatan																
			Ekspo Pembiayaan Bagi Koperasi Dan Umkm	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	500	500	600	600	600	600		

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6. Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)				17		19		21		23		25		25			
			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah																
			Berkembangnya KUMKM melalui pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM																
			Kegiatan																
			Tatakelola Dan Pendampingan Modal Usaha Bagi Kumkm	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan modal usaha	500	750	500	1.026	600	862	463	612	500	700	550	4.250	50		
			Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Kumkm	Jumlah UMKM yang mendapat pendampingan akses pembiayaan	2,500	3,150	1,250	3,550	1,500	4,100	1,800	4,600	2,160	5,100	2,592	5.100	9,302		
4. Meningkatkan minat wirausaha baru	4. Meningkatkan minat wirausaha baru	7. Jumlah wirausaha baru (kumulatif Orang selama 5 tahun)				300		1.800		3.300		4.800		6.300		6.300			
			Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah																
			Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM di Jawa Barat																
			Kegiatan																
			Pencetakan 100 Ribu Wirausaha Baru	Terlaksananya pencetakan 100 ribu wirausaha baru	-	300	1,800	1,800	5,900	3,300	6,100	4,800	6,200	6,300	6,500	6,200	33,000		
5. Meningkatkan kapasitas wirausaha Jawa Barat	5. Meningkatkan kemampuan wirausaha baru	8. Persentase wirausaha baru yang menjadi pelaku usaha (besaran %/tahun)					100		100		70		60		60		60		
			Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah																
			Berkembangnya kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUKM di Jawa Barat																

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kegiatan																
			Pelatihan Teknis Substantif Bagi Umkm	Jumlah UMKM yang Mengikuti Pelatihan Teknis Substantif	500	900	1.000	375	474	410	525	450	580	500	650	2.635	3.229		
			Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Bagi Koperasi Dan Umkm	Jumlah KUMKM yang Mendapatkan Pendampingan Teknologi Tepat Guna	-	700	900	800	1,080	950	1,296	1.150	1.555	1,400	1,866	1,400	6,697		
			Pengembangan Wirausaha Berdayasaing	Jumlah WUB yang Mendapatkan Pendampingan	200	150	1.000	325	1.200	525	1,440	750	1,728	1,000	2,073	1,000	7.441		
			Jabar Cyber Koperasi Dan Paviliun KUMKM	Jumlah Fasilitasi Jabar Cyber dan Paviliun KUMKM	5	2	500	2	741	4	800	4	1000	4	1000	16	4.041		
			Pengembangan Industri Keramik Dan Gerabah (Tkw-22)	Jumlah UMKM Industri Keramik dan Gerabah yang Dibina	-	-	-	60	100	100	225	130	300	150	400	150	400		
			Pengembangan Jasa Perdagangan, Industri Kreatif Dan Pariwisata (Tkw-44)	Jumlah UMKM Industri Perdagangan dan Industri Kreatif yang Dibina	-	-	-	60	100	100	225	130	300	150	400	150	400		
			Pengembangan Industri Batik Dan Rotan (Tkw 33)	Jumlah UMKM Industri Batik dan Rotan yang Dibina	-	-	-	60	100	100	225	130	300	150	400	150	400		
			Monitoring Dan Evaluasi Pemberdayaan Kumkm	Jumlah UMKM yang Dimonitoring dan Dievaluasi	2.000	2.000	275	750	272	1.000	500	1.500	750	1.500	750	6.750	2.547		
			Perkuatan KUMKM di Kawasan Ciletuh	Jumlah KUMKM yang Dilatih	-	-	-	-	-	25	100	300	2.500	300	2.750	300	2.750		
			Peningkatan Kapasitas SDM KUMKM (DAK)	Jumlah UMKM yang Dilatih	-	-	-	-	-	1.440	5.000	1.440	5.000	1.440	5.000	1.440	5.000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOPERASI DAN UMKM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang berdasarkan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013–2018, dan merupakan akumulasi target setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode renstra dapat dicapai untuk mewujudkan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Perumusan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.
3. Identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yang mencerminkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)	-	15.000	16.078	16.478	16.878	17.278	17.278
2.	Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Legalitas Usaha (UMKM)	-	180	224	267	320	384	384
3.	Peningkatan Omzet UMKM (%)	-	5	5	5	5	5	5
4.	Pertumbuhan Skala Usaha Koperasi (%)	-	3	5	5	5	5	5
5.	Persentase Kredit yang Diserap Koperasi (%)	-	4	6	8	10	12	12
6.	Persentase Kredit yang Diserap oleh UMKM (%)	-	17	19	21	23	25	25
7.	Jumlah Wirausaha Baru (Orang)	-	300	1.800	3.300	4.800	6.300	6.300
8.	Porsentase Wirausaha Baru yang Menjadi Pelaku Usaha (%)	-	100	100	70	60	60	60

BAB VII

PENUTUP

Review Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria penilaian yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan penerapan program pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan dilaksanakan pada periode 2015 s.d. 2018 yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesiapan peran aparatur, kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak yang terkait.

Perlu disampaikan bahwa Review Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat, namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi.

Potensi dan kondisi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diperkirakan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami perkembangan kearah pertumbuhan, oleh sebab itu berbagai upaya pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik. Adapun yang menjadi fokus pada pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat adalah : penciptaan wirausaha baru; peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Akses Pembiayaan; Akses Pasar; Peningkatan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Kualitas Tatakelola Kelembagaan Koperasi; Pengembangan Koperasi Besar dan Koperasi Percontohan, yang disertai kerjasama antara Pemerintah dan Stakeholders terkait serta iklim usaha yang kondusif.

Penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) pada tahun 2015 merupakan salah satu respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi. Dengan demikian dokumen perencanaan ini dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dan dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan.

Hasil Review Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat periode tahun 2015 -2018 ini menjadi acuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing Bidang dan Balatkop di lingkungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat dan dapat dilaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kerja.

Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan membawa kemajuan serta mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dengan dukungan semua pihak terkait.

Lembar Kesepakatan Renstra 2013 -2018
Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sekretaris	Kepala Bidang Koperasi	Kepala Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk KUMKM	Kepala Bidang Pembiayaan dan Teknologi	Kepala Bidang Pengawasan	Kepala Balai Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Drs. Setiabudi, M.Si	Dra. Elis Yatimah, MM	Drs. Kusmana Hartadji, MM	R.Rudibilah, S.Sos, MM	Ir. Syariful Yusda, MM	Dr. Deny Rahayu, M.Si

